

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemandirian; kemampuan PAD Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura untuk memenuhi kewajibannya guna pembangunan masyarakat; ketergantungan kepada pemerintah pusat dan pihak eksternal lainnya; dan untuk mengetahui kegiatan belanja dan transfer ke lima pemerintah daerah ini digunakan paling banyak untuk apa. Dipilihnya wilayah Surabaya dalam penelitian ini guna untuk mengetahui apakah pembangunan Jembatan Suramadu akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Madura sebagaimana isu dimasyarakat bahwa pasca diresmikannya Jembatan Suramadu maka wilayah Madura akan sejajar dengan Surabaya yang telah maju. Penelitian ini fokus pada alokasi APBD maupun LRA tahun 2014 hingga 2018 yang merupakan instrumen pemerintah untuk melaksanakan roda pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan *eksplanatoris* (Penjelasan rasio keuangan). Hasil fakta penelitian menunjukkan kemandirian Pemda Surabaya adalah sedang sedangkan Pemda seluruh Madura rendah sekali. Kebutuhan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan eksternal lainnya masih diatas 75% dan alokasi pengeluaran paling banyak untuk alokasi belanja pegawai. Sarannya adalah perlu adanya inovasi baru untuk mendongkrak PAD dan penerapan *e-budgeting* sebagai sarana pengendalian kebocoran keuangan dan pemangkasan belanja yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kemandirian Daerah, PAD, Rasio Keuangan, APBD, LRA, LAKIP

ABSTRACT

This study aims to analyze how independence; the ability of the Regional Government of Surabaya and Madura to fulfill their obligations for community development; dependence on the central government and other external parties; and to find out what spending and transfer activities to these five local governments were used the most for. The Surabaya area was chosen in this study in order to find out whether the construction of the Suramadu Bridge will have a significant impact on economic growth in Madura, as is the issue in the community that after the inauguration of the Suramadu Bridge, the Madura area will be in line with the developed Surabaya. This study focuses on the 2014 to 2018 APBD and LRA allocations, which are government instruments to implement the wheels of government. This study uses a descriptive qualitative method and an explanatory approach (explanation of financial ratios). The results of the research show that the independence of the Surabaya local government is moderate, while the whole Madura government is very low. The need for financial assistance from the central government and other external parties is still above 75% and the highest expenditure allocation is for personnel expenditure allocation. The suggestion is that there is a need for new innovations to boost PAD and the application of e-budgeting as a means of controlling financial leakage and cutting spending effectively and efficiently.

Keywords: Regional Independence, Locally Generated Revenue, Financial Ratio, Regional Income and Expenditure Budget, Budget Realization Report, Government Agency Performance Accountability Report